

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konflik yang terjadi saat ini di Mindanao, merupakan konflik berawal pada abad ke 15. Konflik muncul dari perlawanan penduduk Mindanao terhadap kolonialisasi pemerintah Spanyol ketika berhasil menguasai kepulauan Luzon dan hendak memperluas daerah kekuasaannya ke arah selatan Filipina yaitu Mindanao. Kolonialisasi tersebut berpindah tangan dari Spanyol ke Amerika Serikat menjelang perang dunia ke II, tepatnya tahun 1898. Perpindahan kolonialisasi dari Spanyol ke Amerika Serikat menjadi nilai positif pada awalnya oleh pemerintah Mindanao, itu terlihat dari sikap pemimpin Mindanao yang bersahabat dan kooperatif dengan pemerintah Amerika Serikat ketika itu.

Sikap berbeda para pemimpin di Mindanao ketika Amerika Serikat yang berkuasa. Sikap kooperatif dan patuh yang tidak di tunjukan ketika masa pemerintahan Spanyol tidak terjadi pada masa pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini karena sikap pemerintah Amerika Serikat yang tidak mempersoalkan identitas Islam sebagai identitas kultural yang harus diganti dengan identitas yang baru<sup>1</sup>. Para *datus* yang merupakan representasi pemimpin politik dan budaya di Mindanao pun di berikan ruang untuk mempertahankan budaya Islam yang ada di Mindanao.

---

<sup>1</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*, Yogyakarta, Jusuf Kalla School of Government, 2013 Hal 2

Pada tahun 1926, mulai terjadi konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan penduduk Mindanao yang di sebabkan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan penggabungan antara pemerintahan yang berada di suku Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan *Bacon Bill*.<sup>2</sup> Kebijakan tersebut mendapat protes dari masyarakat dan *datus* di Mindanao untuk segera di batalkan. Pemerintah Amerika Serikat ketika itu dipimpin oleh Roosevelt tetap melaksanakan kebijakan tersebut dan Filipina merdeka dengan memasukan wilayah selatan Filipina yaitu Mindanao sebagai wilayah administratif dari negara Filipina.

Kemerdekaan Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina, kecuali di wilayah Mindanao yang merasa tidak satu identitas, di mana Mindanao sangat kental dengan nuansa Islam sedangkan Luzon dengan nuansa non Islam. Perbedaan identitas yang sulit disatukan ini menjadi permasalahan yang rumit karena menyangkut identitas dua suku yang berbeda tetapi coba di satukan dalam sebuah wilayah administratif negara yaitu Filipina yang justru menimbulkan konflik.

Konflik mulai terjadi pada 4 Juli 1946, yaitu terjadi konflik antara pemerintah Filipina yang ketika itu di pimpin oleh Manuel Quezon dengan masyarakat Mindanao. Konflik tersebut terjadi di sebabkan oleh kebijakan pemerintah Filipina yang ingin menghapus hukum-hukum Islam dan diganti dengan hukum yang berlaku di Filipina. Hal ini menjadi permasalahan bagi

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 2

masyarakat Mindanao, karena identitas Islam sudah melekat di masyarakat Mindanao sejak abad ke 15.

Penyerangan terhadap kantor pemerintahan Filipina di Manila membuat pemerintah sakit hati dan tidak mau mengakui hukum adat di Mindanao. Sikap tersebut membuat Nur Misuari membentuk MNLF (*Moro National Liberation Front*) pada tahun 1969 sebagai kelompok pejuang di Mindanao. Prof. Nur Misuari yang merupakan seorang akademisi di Universitas Filipina.<sup>3</sup> Kedekatan antara Nur Misuari sebagai pendiri MNLF (*Moro National Liberation Front*) dan pemimpin Libya yaitu Khaddafi ketika itu membuat MNLF (*Moro National Liberation Front*) memiliki kekuatan dalam melakukan pemberontakan

Kelompok ini dibentuk sebagai gerakan masyarakat Mindanao terhadap pemerintah Filipina. Keinginan dari kelompok ini adalah untuk merdeka dan keluar dari pemerintahan Filipina yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami masyarakat Mindanao dalam hal politik dan ekonomi. Pasca terbentuknya MNLF (*Moro National Liberation Front*), beberapa negara seperti Malaysia dan Libia menjadi pendukung MNLF (*Moro National Liberation Front*) dengan memberikan pelatihan kepada militan-militan dan dana kepada MNLF (*Moro National Liberation Front*).

Konflik yang terjadi antara pemerintah dan MNLF (*Moro National Liberation Front*) akhirnya berujung dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National*

---

<sup>3</sup> <http://mnlfn.net> diakses tanggal 17 September 2014

*Liberation Front*) sebagai perwakilan dari Mindanao yang di mediasi oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Tripoli yang berisi hak-hak otonomi bagi 13 daerah di Mindanao. Perjanjian tersebut tidak berjalan lancar karena banyaknya penafsiran yang terjadi dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik dan juga terjadi perpecahan di kubu MNLF (*Moro National Liberation Front*) pecah dan muncul MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) pimpinan Salamat Hashim.<sup>4</sup> Hal ini terjadi setelah Salamat Hashim beranggapan bahwa MNLF tidak lagi mewakili Mindanao tetapi lebih kepada suku Sulu yang merupakan salah satu suku di Mindanao. Pilihan politik MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang konfrontatif dalam melawan pemerintahan di Filipina menghasilkan bargaining politik yang kuat dan mendapatkan banyak bantuan dari negara-negara lain seperti Malaysia dalam hal ekonomi, kemudian pelatihan militan di Afghanistan oleh mujahidin Internasional.

Kekuatan kelompok Kristen Filipino berasal dari banyaknya jumlah masyarakat Kristen Filipino di Mindanao yang berasal dari kebijakan politik migrasi oleh Manuel Quezon pada tahun 1950-1970. Hal ini berdampak dengan keterwakilan Mindanao dalam kongres yang 4 diantara 5 perwakilannya merupakan orang Kristen Filipino.<sup>5</sup> Migrasi yang dilakukan selama 20 tahun ini membuat masyarakat Mindanao semakin tidak terwakili dan tidak bisa

---

<sup>4</sup> <http://mnlfn.net.com/Merger.htm> di akses 17 September 2014

<sup>5</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*, Yogyakarta, Jusuf Kalla School of Government, 2013 hal 49

menyampaikan aspirasinya dalam pemerintahan yang memang sudah di dominasi oleh orang-orang dari suku Luzon di pemerintahan pusat dan di Mindanao itu sendiri.

Panjangnya konflik yang terjadi di Filipina, membuat presiden-presiden yang pernah berkuasa di Filipina berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Proses perdamaian yang panjang dan berliku serta berbagai macam tindakan atau keputusan yang dibuat pemerintah Filipina dalam menyelesaikan konflik tersebut, baik penggunaan *Soft Diplomacy* maupun penggunaan militer. Sulitnya mencapai perdamaian diantara pemerintah dan pihak dari Mindanao membuat munculnya pihak ketiga yang berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Salah satu presiden Filipina yang menjabat dari tahun 1972-1986 yaitu Ferdinand Marcos pernah mencapai kesepakatan dengan pihak dari Mindanao. Perjanjian Tripoli tahun 1976 di Libya merupakan hasil dari negosiasi antara pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*) sebagai perwakilan dari masyarakat Mindanao. Pemimpin Libya ketika itu Muammar Qaddafi serta organisasi OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang menjadi fasilitator perdamaian, perjanjian itu sendiri berisi tentang pemberian wilayah administrasi khusus kepada daerah Mindanao.<sup>6</sup>

Perjanjian Tripoli mengalami kegagalan, setelah pemerintah Filipina dianggap tidak mengikuti atau menaati isi perjanjian yang telah di buat dan disepakati oleh pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*)

---

<sup>6</sup> [http://mnlfn.net/The\\_Tripoli.htm](http://mnlfn.net/The_Tripoli.htm) di akses 17 September 2014

sebagai wakil dari masyarakat Mindanao. Perjanjian tersebut akhirnya tidak lagi berlaku dan hanya merupakan salah satu perjanjian yang pernah dibuat dalam upaya penyelesaian konflik di Mindanao.

Hal ini kembali menimbulkan aksi perlawanan dari MNLF (*Moro National Liberation Front*) kepada pemerintah Filipina. Perpecahan MNLF (*Moro National Liberation Front*) yang memunculkan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) semakin membuat konflik yang terjadi di antara pemerintah Filipina dan masyarakat di Mindanao semakin rumit. Pada tahun 1986, presiden Cory Aquino menjadi presiden Filipina menggantikan Ferdinand Marcos.

Negosiasi penyelesaian konflik juga dilakukan di masa pemerintahan Cory Aquino, negosiasi dilakukan antara pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*). Proses negosiasi mengalami gangguan dari MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang merupakan pecahan MNLF (*Moro National Liberation Front*) yang dianggap sudah tidak lagi mewakili orang-orang di Mindanao. MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) mengklaim jika mereka merupakan kelompok yang lebih mewakili masyarakat Mindanao dan harus diajak dalam negosiasi antara pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*).

Masa pemerintahan Cory Aquino dari tahun 1986-1992 menghasilkan perjanjian Jeddah Accord tahun 1987,<sup>7</sup> digantikan oleh presiden Fidel Ramos yang hanya menjabat dari tahun 1992-1994. Presiden Ramos kembali meneruskan

---

<sup>7</sup> <http://peacemaker.un.org/philippines-jeddahaccord87> di akses 17 September 2014

negosiasi yang sebelumnya sudah berjalan. Negosiasi antar pemerintah Filipina dan MNLF kembali menghasilkan perjanjian antara keduanya. Ketika pemerintahan Filipina dibawah presiden Ramos terjadi konsolidasi antara MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dan pemerintah yang menghasilkan *Final Peace Agreement (FPA)*.<sup>8</sup>

Perjanjian tersebut hanya merangkul MNLF saja tidak MILF, sehingga menimbulkan permasalahan baru. Perjanjian tersebut berisi mengenai genjatan senjata antara kedua belah pihak yang berkonflik yaitu pemerintah Filipina dan MNLF. Kesepakatan tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak dan harus ditaati sehingga proses rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik.

Masa kepresidenan Fidel Ramos yang hanya menjabat selama 2 tahun dan digantikan oleh presiden Estrada yang menjabat dari tahun 1998-2001. Proses perdamaian yang sudah digagas dan diperjuangkan oleh presiden sebelumnya justru tidak diteruskan dan ditaati oleh presiden Estrada. Sikap *All Out War* terhadap MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) justru yang dibuat oleh presiden Estrada.

Pengakuan MNLF (*Moro National Liberation Front*) sebagai perwakilan dari masyarakat Mindanao membuat MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) di serang oleh pemerintah Filipina. Pembantaian Jabidah yang menewaskan 60 orang

---

<sup>8</sup> [http://mnlfn.net/The\\_Final.htm](http://mnlfn.net/The_Final.htm) di akses 17 September 2014

muslim Mindanao.<sup>9</sup> Hal tersebut membuat MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) mencari bantuan dari masyarakat Internasional.

Peace proses yang sebelumnya sudah dibuat dan dijalankan kembali mengalami kegagalan. Sehingga memunculkan serangkaian aksi perlawanan oleh masyarakat Mindanao akibat sikap pemerintahan Estrada yang menggunakan militer terhadap MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Presiden Estrada hanya menjabat 3 tahun, kemudian digantikan oleh wakil presidennya Gloria Macapagal Arroyo yang pada periode selanjutnya kembali terpilih sebagai presiden.

Arroyo menjabat selama 1,5 periode atau selama 10 tahun sebagai presiden Filipina. Selama 10 tahun eskalasi konflik yang ada di Mindanao naik turun hal ini dibuktikan dengan kebijakan genjatan senjata dibuat, tetapi di tahun yang sama terjadi konflik bersenjata antara tentara Filipina dengan kelompok perjuangan di Mindanao. Sikap represif pernah dibuat oleh presiden Arroyo, tetapi juga mengambil jalan perundingan juga dilakukan presiden Arroyo.

Terpilihnya presiden Benigno Aquino Junior pada tahun 2010 yang merupakan anak dari presiden Cory Aquino yang menjabat dari 1986-1992. Harapan besar terhadap presiden Aquino Junior untuk bisa menyelesaikan konflik Mindanao secara serius. Perasaan dan harapan itu muncul melihat sosok Aquino yang diharapkan memiliki sifat yang sama dengan sang ayah.

---

<sup>9</sup> Surwandono, *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*, Yogyakarta, Jusuf Kalla School of Government, 2013 hal 3

Penggunaan *soft diplomacy*, seperti negosiasi dan lebih mendengarkan permintaan dari masyarakat Mindanao pada masa Cory Aquino bisa kembali terjadi pada masa Aquino Junior. Usaha-usaha perdamaian yang sebelumnya dianggap tidak serius atau hanya sebagai intrik politik diharapkan tidak lagi terjadi di masa pemerintahan Aquino Junior.

Usaha-usaha pendekatan dan upaya penyelesaian konflik secara serius terlihat pada saat Aquino Junior melakukan negosiasi berbulan-bulan untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian atau pakta perdamaian dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Berbagai macam jalan pernah ditempuh oleh para presiden Filipina demi menyelesaikan konflik. Namun, hasil yang sama selalu terjadi, mulai dari pelanggaran isi perjanjian dan konflik bersenjata antara pemerintah dan masyarakat Mindanao.

## **B. Pokok Permasalahan**

Bagaimana kebijakan Pemerintah Filipina di bawah pemerintahan Aquino Junior terhadap proses perdamaian di Mindanao ?

## **C. Kerangka Teori**

### **Teori Perdamaian**

Menurut teori Johan Galtung (1992) dalam buku *Handbook of Peace and Conflict Studies* oleh Routledge yang di edit oleh Charles Webel dan Johan Galtung ada 8 komponen perdamaian. Sebelum berbicara mengenai 8 komponen

tersebut, Johan Galtung menjelaskan mengenai 4 kelompok kebutuhan dasar manusia dan 4 kelompok yang berlawanan dari 4 kebutuhan dasar tersebut.

Ada 4 kelompok kebutuhan dasar manusia yang di maksud Johan Galtung :

1. Kelangsungan hidup
2. Kesejahteraan Ekonomi
3. Kebebasan
4. Identitas

Sedangkan 4 kelompok yang berlawanan atau yang ditakuti dari 4 hal kebutuhan dasar manusia tersebut:

1. Kematian
2. Kesengsaraan
3. Penindasan
4. Pengasingan

Dari 4 hal yang saling berkaitan mengenai kepentingan dasar manusia dan yang berlawanan dengan hal tersebut, Johan Galtung juga memberikan penjelasan mengenai berbagai macam ancaman yang diberikan dalam bentuk-bentuk kekerasan . Setidaknya ada 4 bentuk kekerasan menurut Johan Galtung:

1. Kekerasan langsung

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan berupa menyakiti dan membunuh orang dengan senjata

2. Kekerasan struktural I

Kekerasan dengan cara kematian secara perlahan dengan kelaparan, penyakit yang dapat dicegah, dan penderitaan yang disebabkan ketidakadilan struktur sosial

3. Kekerasan struktural II

Kekerasan berupa perampasan kebebasan memilih serta partisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kehidupan orang itu sendiri

4. Kekerasan budaya

Kekerasan dengan cara pembenaran secara langsung dan kekerasan struktural melalui nasionalisme, rasisme, sexisme dan berbagai bentuk diskriminasi dan prasangka

Dari 4 kebutuhan dasar manusia dan 4 hal yang ditakutkan manusia, menghasilkan korespodensi, yaitu :

1. Militer
2. Ekonomi
3. Politik
4. Budaya

Sehingga dirumuskan oleh Johan Galtung terkait dengan 4 hal dasar kebutuhan manusia dan 4 hal yang ditakuti manusia dan juga kekerasan yang

harus dihindari untuk mempercepat proses perdamaian. Johan Galtung mengenai 8 komponen perdamaian tersebut dimuat tabel:

**Tabel 1.1**

**8 Komponen Perdamaian Menurut Johan Galtung**

<b>Jenis Perdamaian</b> <b>Kebutuhan Dasar</b>	<b>Negative Peace</b>	<b>Positive Peace</b>
<b>Kelangsungan Hidup:</b> tidak adanya kekerasan langsung yang disebabkan oleh kekuatan militer	Ketiadaan kekerasan langsung: gencatan senjata, perlucutan senjata, pencegahan terorisme dan negara terorisme, non-kekerasan	Hidup meningkatkan kerjasama dan pencegahan kekerasan langsung: perdamaian, transformasi konflik, rekonsiliasi dan rekonstruksi
<b>Pembangunan (Kesejahteraan Ekonomi):</b> tidak adanya kekerasan struktural I disebabkan oleh kekuatan ekonomi	Bantuan kemanusiaan, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan dan kesengsaraan	Membangun ekonomi mempertahankan hidup di tingkat lokal, nasional dan global di mana kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi
<b>Kebebasan:</b> tidak adanya kekerasan	Pembebasan dari penindasan penjajahan,	kediktatoran pemerintah yang baik dan partisipasi,

struktural II disebabkan oleh politik kekuasaan		self-determinasi, hak asasi manusia
<b>Perdamaian Budaya</b> <b>(identitas):</b> tidak adanya kekerasan budaya yang disebabkan oleh daya	Mengatasi budaya prasangka berdasarkan kebangsaan, ras, bahasa, jenis kelamin, usia, kelas, agama, dll; penghapusan pemuliaan perang dan kekerasan di media, sastra, film, monumen, dll	Promosi budaya perdamaian dan saling belajar: komunikasi global dan dialog, pengembangan budaya dalam damai dan structures mendalam; pendidikan perdamaian; jurnalisme damai

Sumber : Handbook of Peace and Conflict Studies hal 188

Sehingga teori 8 komponen perdamaian yang diutarakan oleh Johan Galtung merupakan proses perdamaian yang berasal dari 4 kebutuhan dasar manusia yang harus dicapai dan 4 hal yang ditakuti manusia yang harus di hindari, dengan cara meniadakan 4 kekerasan struktural dalam proses perdamaian.

Pentingnya faktor-faktor seperti militer, ekonomi, politik dan budaya dalam proses perdamaian dalam kebijakan yang akan di bentuk. Kebijakan dari 4 hal tersebut bisa saja mempercepat atau memperlambat proses perdamaian. Sehingga pembuatan kebijakan mengenai politik, ekonomi, militer dan budaya harus hati-hati.

Sehingga implementasi perdamaian dijelaskan dalam 8 komponen perdamaian yang terdiri dari 4 kategori yang masing-masing terdapat dalam *positive* dan *negative peace*. Berikut penjelasan 4 kategori perdamaian dalam 8 komponen perdamaian Johan Galtung :

### 1. Kelangsungan Hidup

Pentingnya kelangsungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia yang di bagi dalam *positive peace* yang menjelaskan tentang meningkatkan kerjasama dan pencegahan kekerasan langsung: perdamaian, transformasi konflik, rekonsiliasi dan rekonstruksi, sedangkan *negative peace* berbicara mengenai ketiadaan kekerasan langsung: gencatan senjata, perlucutan senjata, pencegahan terorisme dan negara terorisme, non-kekerasan. Kelangsungan hidup merupakan salah satu kategori perdamaian yang dipengaruhi oleh militer.

### 2. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud Johan Galtung adalah pengembangan dalam sektor ekonomi, Dalam kategori *positive peace* menekankan membangun ekonomi mempertahankan hidup di tingkat lokal, nasional dan global di mana kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi, sedangkan dalam kategori *negative peace* menekankan tentang bantuan kemanusiaan, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan dan kesengsaraan.

### 3. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud oleh Johan Galtung adalah kebebasan yang berasal dari sektor politik. Dalam kategori kebebasan, *positive peace* menekankan kediktatoran pemerintah yang baik dan partisipasi, self-determinasi, hak asasi manusia. Sedangkan dalam kategori *negative peace* menekankan pembebasan dari penindasan penjajahan. Sehingga tidak terjadi kekerasan yang disebabkan oleh kekuasaan politik.

### 4. Perdamaian Budaya (identitas)

Perdamaian budaya yang di maksud Johan Galtung adalah ketiadaan kekerasan yang bersaal dari diskriminasi budaya. Dalam kategori *Positive Peace* menekankan promosi budaya perdamaian dan saling belajar: komunikasi global dan dialog, pengembangan budaya dalam damai dan sstructures mendalam; pendidikan perdamaian; jurnalisme damai. Sedangkan *Negative Peace* menekankan untuk mengatasi budaya prasangka berdasarkan kebangsaan, ras, bahasa, jenis kelamin, usia, kelas, agama, dll; penghapusan pemuliaan perang dan kekerasan di media, sastra, film, monumen, dll

Kebijakan perdamaian yang coba dibuat oleh presiden Benigno Aquino III menggunakan *positive peace* dan *negative peace*. Kebijakan militer dan perdamaian seperti *Formal Exploratory Talks*, kebijakan ekonomi seperti kredit tanah, dan kebijakan politik seperti Administrative Order No.32. Kebijakan tersebut untuk menunjukkan keseriusan perdamaian dan pendekatan tanpa menggunakan kekerasan. Sehingga perdamaian bisa tercapai. Berdasarkan teori

Johan Galtung, maka dalam analisa skripsi ini akan menggunakan 3 aspek dari 4 aspek yang dijelaskan oleh Johan Galtung:

1. Aspek Survival -> Genjatan Senjata dan Proses Perdamaian
2. Aspek Development -> Kebijakan Ekonomi
3. Aspek Freedom -> Kebijakan Politik

#### **D. Hipotesa**

Kebijakan Pemerintah Filipina di bawah pemerintahan Aquino Junior terhadap proses perdamaian di Mindanao adalah

1. Menghentikan kekerasan oleh militer dan mempercepat proses perdamaian
2. Menghentikan kekerasan struktural akibat dari kekuatan ekonomi
3. Menghentikan kekerasan secara struktural akibat dari kekuatan politik

#### **E. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian mengenai proses perdamaian di Mindanao pada masa presiden Aquino Junior :

1. Untuk mengukur dan melihat keseriusan dari usaha pemerintah Filipina di bawah Aquino Jr dalam menyelesaikan konflik di Mindanao
2. Perbandingan sejauh mana keseriusan pemerintah Filipina di bawah Aquino Junior dalam menyelesaikan konflik di Mindanao dibandingkan dengan presiden yang sebelumnya.

3. Untuk mengetahui sejauh mana usaha proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan masyarakat Mindanao dalam menyelesaikan konflik

## **F. Metodologi**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu waktu tertentu.<sup>10</sup>

### **2. Metode Pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti Jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan surat kabar. Tambahan data-data bisa juga berasal dari Internet atau situs-situs yang relevan atau berkesinambungan dengan judul penelitian

### **3. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga tahap : mereduksi data ,menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan

---

<sup>10</sup> J. Suprpto, dalam Skripsi Dwi Apriyanto *Signifikasi Pengentasan Kemiskinan Sebagai Upaya Perdamaian* , UMY, 2008, hal 24

hingga data yang terkumpul saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.<sup>11</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Sehingga dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti : melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

b. Sajian data (data display)

Sajian data berisi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dikumpulkan untuk mendapat informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang satu dan mudah dipahami. Pengumpulan data dilakukan sebelum menarik atau membuat kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi (concluding drawing)

Pembuatan kesimpulan yang dilakukan di akhir merupakan hasil dari sajian data yang telah dikumpulkan dan di susun oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dibuat oleh peneliti setelah pengumpulan data yang dibutuhkan sudah di anggap cukup. Sehingga bisa menghasilkan kesimpulan atau di verifikasi

---

<sup>11</sup> Mattew B. Miles dan A. Micheal Huberman dalam Skripsi Dwi Apriyanto *Signifikasi Pengentasan Kemiskinan Sebagai Upaya Perdamaian* , UMY, 2008, hal 24

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang saya buat dari tahun 2010-2014, karena masa jabatan seorang presiden di Filipina selama 4 tahun. Sehingga saya membatasi ruang lingkup penelitian saya, yaitu dari tahun 2010-2014. Hal itu saya lakukan karena saya ingin fokus tentang proses perdamaian di Mindanao pada masa pemerintahan presiden Aquino Junior

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 5 bab besar atau garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan, terdapat sub bab yang akan memperinci atau berisi detail dari garis besar bab bab yang sebelumnya sudah di buat atau di tulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah dalam pembaca memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

### **BAB I**

Berisi tentang pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian

### **BAB II**

Berisi tentang dinamika kebijakan presiden Filipina di Mindanao. Bab ini akan menjelaskan rezim rezim presiden yang pernah menjabat sebagai

presiden Filipina dan bagaimana sikap serta kebijakan yang dibuat untuk Mindanao

### BAB III

Berisi tentang dinamika konflik di Mindanao. Bab ini berisi tentang kelompok-kelompok yang berpengaruh dan berada di Mindanao. Bab ini berisi penjelasan tentang kelompok Kristen Filipino, MNLF (*Moro National Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), dan Abu Sayyaf Group

### BAB IV

Berisi tentang analisa tentang proses perdamaian Mindanao dibawah presiden Benigno Aquino III. Analisa bab ini akan menggunakan teori Johan Galtung yang akan menjawab hipotesa. Bab ini akan membahas tentang kebijakan Politik, Ekonomi dan Proses perdamaian di Mindano

### BAB V

Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.